

**Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Produksi Terbatas  
bagi Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat  
(Contribution of Non Timber Forest Products from Limited Production Forest  
for Household Income)**

**Rudi Meirawan Pohan<sup>1</sup>, Agus Purwoko<sup>2</sup>, Tri Martial<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara,  
Jl. Tri Dharma Ujung No. 1 Kampus USU Medan 20155 (Penulis Korespondensi, E-mail: meirawanrudi@gmail.com)

<sup>2</sup> Staf Pengajar Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara,  
Jl. Tri Dharma Ujung No. 1 Kampus USU Medan 20155

<sup>3</sup> Staf Pengajar Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara, Jl. Karya Bakti No. 34 Medan Johor

**ABSTRACT**

*Forest area is still gives contribution from non timber forest products (HHBK) economic value to household income of the community around the forest highly. This research was conducted on June-July 2013 in Simasom Village, Subdistrict of Padangsidempuan Angkola Julu, Padangsidempuan City by using purposive sampling method which means that the choised respondents were who employing at non timber forest products (HHBK) directly from limited production forest. The aims of this research were to identify the kinds of HHBK, to determine the economic value of HHBK along with the contributions to household income, and to determine the income distribution of this HHBK employing and to make a poverty analysis about the people concerned on this HHBK income to reduction of the people's poverty rate.*

*The results of this research showed that the kinds of HHBK which is employed by the people from limited production forest are: rattan, nira water, palm fiber, sugar from palm sugar, fruits of sugar palm, bamboo, cinnamons, deer, bracken, pig, durian, candlenut, petai, lanseh fruit, top soil, and firewood. While, the total contribution of HHBK from limited production forest to household income in Simasom Village was Rp. 723.519.000,-/year (39,22%). Then, the imbalance of people's income distribution from HHBK employment from limited production forest can be measured according to Gini Coefficient value that is 0,42 which means that the high enough imbalance between the rich employer and the poor one has happened. While, the income from HHBK has been contributed to reduce the persistent poverty people about 15 persons or about 30% of household.*

*Key Words: Non timber forest products, economic value, contribution of income, income distribution, poverty.*

**PENDAHULUAN**

Selain nilai ekonominya yang jauh lebih besar dari kayu, pemungutan HHBK tidak menyebabkan kerusakan hutan, sehingga tidak akan mengakibatkan hilangnya fungsi-fungsi dan nilai jasa dari hutan. Kontribusi HHBK terhadap kehidupan masyarakat hutan selain sangat berarti secara ekonomi juga lebih merata dibandingkan dengan kayu dari segi distribusi pendapatan. Manfaat dari kayu hanya dinikmati oleh masyarakat tertentu saja, yaitu mereka yang memiliki modal paling kurang satu unit *chainsaw*.

Hutan di lokasi penelitian ini masih menyimpan potensi dari hasil-hasil hutannya khususnya HHBK walaupun pengelolaan dan pemanfaatannya belum optimal, padahal dalam pemanfaatan HHBK tidak serumit prosedur pemanfaatan hasil hutan kayu karena HHBK bisa dimanfaatkan masyarakat secara bebas termasuk di hutan produksi terbatas kecuali pada kawasan pelestarian alam (Dephut, 1990).

Permasalahan dalam pemanfaatan dan pengelolaan HHBK ini antara lain ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat pemanfaat HHBK di wilayah desa ini yang berdampak pada ketidakmerataan pendapatan masyarakat dari HHBK dari hutan produksi terbatas tersebut. Pendapatan dari sektor HHBK ini akan berkontribusi juga terhadap pendapatan rumah tangga

masyarakat secara keseluruhan sehingga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat desa di sekitar hutan. Atas dasar tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang kontribusi ekonomi hasil hutan bukan kayu bagi pendapatan rumah tangga masyarakat sekitar hutan produksi terbatas (HPT) di Desa Simasom.

**METODE PENELITIAN**

**Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2013 sampai Juni 2013 di Desa Simasom, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan. Merupakan daerah yang memiliki hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan oleh para petani atau masyarakat desa untuk menambah pendapatan rumah tangganya.

**Bahan dan Alat**

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (*questionnaire*) untuk mengumpulkan data primer serta data sekunder yang sudah ada disediakan oleh instansi-instansi resmi yang terkait seperti peta wilayah dan dokumen lain yang berkaitan dengan lokasi penelitian. Selain itu, untuk melengkapi pengamatan langsung di lapangan diperlukan beberapa alat bantu

seperti kamera, *tape recorder*, alat-alat tulis, dan kalkulator.

### Metode Pengumpulan Data

Data yang mendukung penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara (*interview*) dengan para responden yaitu masyarakat yang memanfaatkan HHBK secara langsung dari hutan produksi terbatas di wilayah penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian populasi dimana jumlah masyarakat yang memanfaatkan HHBK dari hutan produksi terbatas tersebut adalah sebanyak 50 orang. Menurut Arikunto (2006) apabila subjeknya kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semuanya sehingga menjadi penelitian populasi.

Data yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian tentang penilaian hasil hutan bukan kayu antara lain sebagai berikut:

#### a. Data primer.

Data primer merupakan hasil observasi dan wawancara terhadap responden di lapangan yang meliputi :

- Faktor sosial, ekonomi dan budaya responden yang meliputi umur, suku, agama, pekerjaan, pendapatan, mata pencaharian, pendidikan, jumlah tanggungan, usaha pertanian yang dimiliki, lama menetap.
- Jenis dan jumlah HHBK yang diambil responden, frekuensi pengambilan, lama dan waktu pengambilan, cara pemanfaatan HHBK, cara pemasaran HHBK yang diperoleh, serta kendala-kendala dalam pengelolaan HHBK.
- Biaya pengambilan HHBK yang meliputi biaya transportasi, konsumsi, peralatan dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk mengambil hasil hutan tersebut.

#### b. Data sekunder.

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari hasil pencatatan terhadap data yang sudah tersedia di instansi resmi seperti :

- Kondisi umum lokasi penelitian.
- Peta wilayah
- Data kependudukan (Demografi)

Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara kuesioner dan observasi terhadap responden. Observasi dalam hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan mendalam dari responden.

### Teknik dan Tahapan Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang dilakukan secara langsung di lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi jenis-jenis HHBK yang ada di Desa Simasom, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan.
- b. Melakukan observasi dan analisis pengolahan data di lapangan untuk mengetahui sistem pemanfaatan HHBK dari hutan produksi terbatas di Desa Simasom, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan.
- c. Melakukan wawancara (*interview*) dengan menggunakan kuesioner terhadap para pelaku usaha dan para pihak pemangku kepentingan dalam

pengolahan hutan produksi terbatas di Desa Simasom, Kecamatan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan.

- a. Seluruh data baik data primer dan sekunder selanjutnya diolah sesuai dengan kebutuhan sebelum dilakukan pengolahan dan analisis data. Data yang bersifat kualitatif yang meliputi: data sekunder pada umumnya yang meliputi kondisi umum wilayah dan data kependudukan, data yang mencakup faktor sosial ekonomi dan budaya masyarakat, cara pemanfaatan dan pemasaran HHBK, serta kendala dalam pengelolaan HHBK selanjutnya dianalisis secara deskriptif sesuai tujuan penelitian. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nazir (1988) yang menyatakan bahwa metode deskriptif digunakan untuk mengetahui dan menganalisis data yang terkumpul dari hasil kuesioner, wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif yang meliputi: jenis dan jumlah HHBK dari hutan produksi terbatas yang diambil responden, frekuensi pengambilan, lama dan waktu pengambilan, jumlah pengambil per jenis HHBK, serta harga HHBK masing-masing jenis yang dipasarkan diolah secara tabulatif sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif yang meliputi: jenis dan jumlah HHBK yang diambil responden, frekuensi pengambilan, lama dan waktu pengambilan, pengambil per jenis HHBK, serta harga hasil hutan yang dipasarkan diolah secara tabulatif.

### Analisis Data

#### a. Jenis dan Nilai Ekonomi HHBK

Data mengenai jenis, satuan produksi (unit), jumlah yang diambil, frekuensi pengambilan, serta jumlah pemungut tiap jenis HHBK yang didapat dari hasil wawancara dapat disajikan seperti dalam Tabel 1 (Latifah, 2004).

Tabel 1. Jenis hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan masyarakat desa sekitar hutan

No	Jenis HHBK	Sat. (unit)	Jlh diambil (unit/frek./ resp.)	Frek. pengambil (unit/thn /resp.)	Jlh pengambil (org/jenis brg)
1					
2					
...					
...					
n					
Total					

Nilai barang hasil hutan bukan kayu untuk setiap jenis per tahun yang diperoleh masyarakat dapat dihitung dengan cara:

1. Menghitung nilai rata-rata jumlah barang yang diambil per responden, frekuensi pengambilan per

jenis barang per responden per tahun dan jumlah pengambil per jenis barang.

Rata-rata jumlah barang yang diambil:  $\frac{X_i + X_{ii} + \dots + X_n}{n}$

Keterangan:  $X_i$  = Jumlah barang yang diambil responden

$n$  = Jumlah pengambil per jenis barang

2. Nilai rata-rata jumlah yang diambil dikali rata-rata frekuensi pengambil, lalu dikali total jumlah pemungut akan diperoleh total pengambilan per unit barang per tahun (Affandi dan Patana, 2002).

$$TP = RJ \times FP \times JP$$

Keterangan:

TP : Total pengambilan per tahun

RJ : Rata-Rata Jumlah Yang Diambil

FP : Frekuensi Pengambilan

JP : Jumlah Pengambil

3. Nilai ekonomi barang hasil hutan per jenis barang per tahun dihitung dari perkalian antara total pengambilan per jenis barang dikalikan harga.

$$NH = TP \times HH$$

Keterangan:

NH : Nilai Hasil Hutan per Jenis

TP : Total Pengambilan (unit/tahun)

HH : Harga Hasil Hutan

Tabel 2. Hasil perhitungan barang hasil hutan bukan kayu

No	Jenis barang HHBK	Total pengambilan (Unit/Tahun)	Harga hasil hutan (Rp/Unit)	Nilai hasil hutan (Rp/Tahun)
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
n				
Total				

4. Menghitung persentasi nilai ekonomi dengan cara:

$$\%NE = \frac{NE_i}{\sum NE} \times 100\%$$

Keterangan:

%NE : Persentasi Nilai Ekonomi

$NE_i$  : Nilai Ekonomi Hasil Hutan/Jenis

$\sum NE$  : Jumlah Total Nilai Ekonomi dari Seluruh Hasil hutan

### b. Kontribusi Ekonomi HHBK

Hasil perhitungan hasil hutan menunjukkan total pendapatan hasil hutan seluruh jenis per tahun, sehingga dapat dihitung besar nilai kontribusi dari nilai hasil hutan ini terhadap pendapatan masyarakat. Menghitung tingkat kontribusi pemanfaatan hasil hutan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

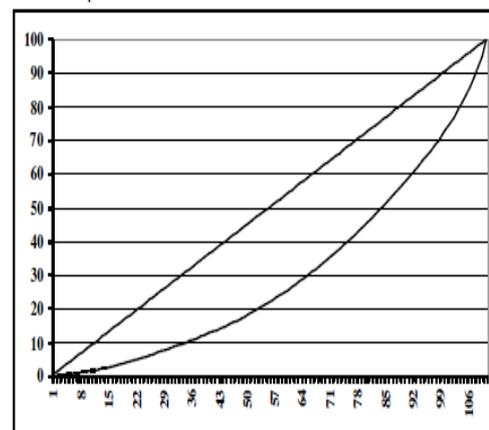
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pendapatan Hasil Hutan Bukan Kayu}}{\text{Pendapatan Total}} \times 100\%$$

Pendapatan total merupakan penjumlahan antara pendapatan hasil hutan bukan kayu dengan pendapatan luar hasil hutan bukan kayu. Pendapatan dalam hutan adalah jumlah nilai ekonomi dari seluruh jenis. Sedangkan, pendapatan luar hutan selisih antara pendapatan total dengan pendapatan dalam hutan.

### c. Distribusi Pendapatan HHBK yang Dimanfaatkan Masyarakat

Distribusi pendapatan dapat berwujud pemerataan maupun ketimpangan, yang menggambarkan tingkat pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi (Rahayu, dkk., 2000). Distribusi dari suatu proses produksi terjadi setelah diperoleh pendapatan dari kegiatan usaha. Pengukuran masalah pemerataan telah sejak lama menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Namun, pendekatan pengukuran yang sering digunakan untuk mengukur ketidakmerataan dari distribusi pendapatan adalah *Gini coefficient* yang dibantu dengan menggunakan *Lorenz curve* (Gambar 1). Sedangkan untuk mengukur tingkat kemiskinan digunakan metode *headcount measure* dan *poverty gap*. Ukuran yang dipakai dalam menentukan ketidakmerataan baik di tingkat wilayah maupun rumah tangga adalah *gini coefficient* dan tingkat kemiskinan.

% Kumulatif Pendapatan



% Kumulatif Populasi

Gambar 1. Kurva Lorenz dan Garis Pemerataan Pendapatan

*Gini coefficient* merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran-pengeluaran konsumsi atau variabel-variabel lain yang terkait dengan distribusi di mana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik (Bappenas, 2002). Tingkat ketimpangan dapat diukur juga melalui *personal income* dengan menggunakan Kurva Lorenz, yaitu yang menggambarkan hubungan kuantitatif antara persentase populasi penerima pendapatan dengan persentase total pendapatan yang benar-benar diperoleh selama jangka waktu tertentu, seperti terlihat pada Gambar 1 (Santosa dan Prayitno, 1996 yang dikutip oleh Rahayu, dkk., 2000). Garis Kurva

Lorenz akan berada di atas garis horizontal, bila kurva tersebut menjauh dari kurva diagonal atau garis pemerataan maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dari suatu usaha ekonomi (dalam hal ini pemanfaatan HHBK dari hutan produksi terbatas) juga akan semakin tinggi.

Tinjauan lain mengenai ukuran distribusi pendapatan masyarakat pada suatu skala usaha di tingkat rumah tangga adalah tingkat kemiskinan dengan pokok bahasan utamanya yaitu garis kemiskinan (*poverty line*) dan ukuran kemiskinan (*poverty measurement*), yang merupakan indikator kuantitatif untuk menentukan individu atau kelompok masyarakat miskin. Garis kemiskinan biasanya dihubungkan dengan standar hidup, yaitu jumlah uang yang dihasilkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (barang dan jasa). Namun konsep ini masih terus diperdebatkan, khususnya dalam menentukan keluarga atau masyarakat yang perlu ditolong melalui program penanggulangan kemiskinan. Selama ini data kemiskinan yang dipakai di Indonesia adalah yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

BPS menggunakan kebutuhan dasar atau konsumsi keluarga untuk kemiskinan dan dikonversikan ke dalam rupiah. BPS mengkonversikan ukuran kemiskinan ke dalam 2.100 kalori per kapita per hari ditambah kekurangan pakaian, rumah tinggal, kesehatan, pendidikan, bahan bakar dan keperluan transportasi.

BKKBN membagi kemiskinan menjadi 5 (lima) ukuran, yaitu prasejahtera (dibagi dua alasan ekonomi dan bukan ekonomi), sejahtera I (dibagi dua alasan ekonomi dan bukan ekonomi), sejahtera II, sejahtera III dan sejahtera III+. Keluarga Miskin (Gakin) menurut BKKBN adalah prasejahtera dengan alasan ekonomi, dan sejahtera I dengan alasan ekonomi.

Perbedaan versi ini menyebabkan perbedaan jumlah penduduk miskin di berbagai daerah dan pada waktu tertentu yang didasarkan pada masing-masing kriteria tersebut. Sebagai contoh jumlah penduduk miskin pada tahun 1999 menurut BPS adalah sebanyak 47,97 juta jiwa, sementara BKKBN melaporkan sebanyak 52,29 juta jiwa (pra KS dan KS 1 dengan alasan ekonomi), dan SMERU juga melaporkan 55,80 juta jiwa.

Bank Dunia menetapkan ukuran kemiskinan melalui ukuran dollar, yaitu US\$ 1 per orang per hari (berdasarkan *power purchase parity* tahun 1993). Karenanya, bila suatu individu hanya mampu berpenghasilan kurang dari satu dollar per hari dapat dikatakan di bawah garis kemiskinan. Bank Dunia melontarkan pemikiran pengukuran kemiskinan melalui metoda Penilaian Kemiskinan secara Partisipatif (*Participatory Poverty Assessment/PPA*) oleh komunitas miskin itu sendiri untuk menentukan dimensi-dimensi kemiskinan pada komunitas tersebut. *Participatory Poverty Assessment* digunakan untuk memahami kemiskinan dari sudut pandang kaum miskin dengan memfokuskan pada realita, kebutuhan, dan prioritasnya.

*Participatory Poverty Assessment* mengidentifikasi bahwa kemiskinan juga ditekankan pada aspek-aspek lain seperti kerentanan, keterisolasian secara fisik dan sosial, kurangnya rasa aman dan harga diri, dan ketidakberdayaan (Pandji, 2001).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penentuan garis kemiskinan berdasarkan kriteria BPS dan BKKBN dinilai kurang memadai untuk menjawab persoalan penentuan garis kemiskinan karena selain menyebabkan perbedaan jumlah penduduk miskin yang cukup mencolok yang dihasilkan oleh perhitungan kedua kriteria tersebut, juga tidak dapat dijadikan acuan untuk penentuan garis kemiskinan secara global, mengingat kriteria ini disesuaikan juga dengan kondisi perekonomian masing-masing daerah pada waktu tertentu. Sehingga metode penentuan kriteria garis kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria yang dikeluarkan oleh Bank Dunia yang telah memiliki standarisasi serta lebih mampu menjawab persoalan penentuan kemiskinan ini secara global dan lebih mampu dalam mengungkap fakta yang sebenarnya yang dialami masyarakat tanpa ada sedikitpun yang ditutup-tutupi.

Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan dengan menggunakan *headcountinde*.

$$K = q/n \times 100\%$$

Di mana: K = tingkat kemiskinan; q = jumlah penduduk miskin atau berada di bawah garis kemiskinan; dan n = jumlah penduduk.

Penentuan garis kemiskinan menggunakan standar tingkat kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia pada suatu daerah. Oleh karena itu dapat dikategorikan:

- Jika responden masyarakat pemanfaat HHBK berada di atas garis kemiskinan, maka dikategorikan sebagai masyarakat yang kaya atau mapan.
- Jika responden masyarakat pemanfaat HHBK berada disekitar garis kemiskinan, maka dapat dikategorikan masyarakat berada dalam kerentanan (*vulnerable/transien*), yaitu jika ada kejadian yang luar biasa atau pendapatan dari usaha pemanfaatan HHBK berkurang akan jatuh miskin.
- Jika responden masyarakat pemanfaat HHBK berada di bawah garis kemiskinan, maka dikategorikan sebagai kemiskinan persisten.

Adapun formula yang dipakai untuk menghitung tingkat ketimpangan yang terjadi pada masyarakat pemanfaat HHBK sebagai berikut:

$$GC = 1 - \sum_{i=1}^n (\sigma Xi - \sigma Xi - 1) (\sigma Yi - 1 + \sigma Yi)$$

Dimana GC = *Gini Coefficient*; Xi = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i; dan Yi = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i.

Nilai gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila nilai gini mendekati satu maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan.

Sedangkan semakin kecil atau mendekati nol suatu nilai gini maka semakin meratanya distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Klasifikasi penggunaan koefisien Gini (*Gini Ratio*) menurut H.T. Oshima dalam Suseno (1990) adalah sebagai berikut:

- Bila koefisien Gini  $\leq 0,30$  termasuk distribusi ketimpangan rendah.
- Bila koefisien Gini  $0,31 - 0,40$  termasuk kondisi ketimpangan sedang.
- Bila koefisien Gini  $> 0,40$  termasuk kondisi ketimpangan tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Jenis-jenis dan Pemanfaatan HHBK dari Hutan Produksi Terbatas

Jenis-jenis HHBK yang dimanfaatkan di Desa Simasom dapat dilihat pada Tabel berikut 3.

Tabel 3. Jenis-jenis HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Simasom

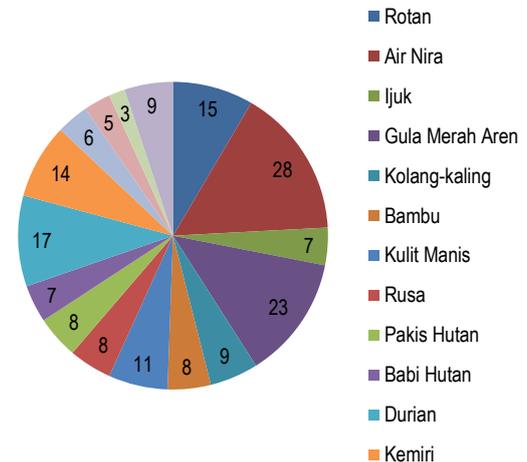
No.	Jenis HHBK	Responden yang memanfaatkan (orang)	
		Jumlah	%
1	Rotan ( <i>Calamus manan</i> )	15	30
2	Air nira	28	56
3	Ijuk	7	14
4	Gula merah aren	23	46
5	Kolang-kaling	9	18
6	Bambu ( <i>Asparagus cochinchinensis</i> )	8	16
7	Kulit manis ( <i>Cinnamomum burmani</i> )	11	22
8	Rusa ( <i>Muntingia muntingia</i> )	8	16
9	Pakis hutan ( <i>Cyathea contaminans</i> )	8	16
10	Babi hutan ( <i>Sus scrofa</i> )	7	14
11	Durian ( <i>Durio zibethinus</i> )	17	34
12	Kemiri ( <i>Aleurites moluccana</i> )	14	28
13	Petai ( <i>Parkia speciosa</i> )	6	12
14	Duku ( <i>Lansium domesticum</i> )	5	10
15	Humus	3	6
16	Kayu bakar	9	18
Total		100	100

Keterangan: Jumlah responden sebanyak 50 orang/KK

Dari Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa ada 16 jenis HHBK dari hutan produksi terbatas yang dimanfaatkan masyarakat di Desa Simasom. Dari Tabel 3 tersebut juga dapat dilihat bahwa jenis HHBK yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah air nira dengan jumlah responden pemanfaat sebanyak 28 orang, kemudian turunan dari air nira yaitu gula merah dengan jumlah responden pemanfaat sebanyak 23 orang. Faktor penyebab kedua jenis tersebut banyak dimanfaatkan masyarakat karena memang bisa diambil hasilnya hampir setiap hari dengan jumlah permintaan konsumen yang lebih besar dibandingkan jenis-jenis lain. Sementara jenis yang paling sedikit dimanfaatkan masyarakat adalah humus dengan jumlah responden pemanfaat hanya 3 orang. Humus jarang dimanfaatkan masyarakat secara komersil karena permintaan pasarnya yang memang sedikit. Umumnya masyarakat hanya memanfaatkan humus untuk keperluan pribadi

khususnya sebagai pupuk alternatif untuk keperluan pertanian mereka disaat harga pupuk melonjak dan peredaran pupuk palsu sedang marak di pasaran. Gambar 2 berikut ini menggambarkan proporsi jumlah pemanfaat HHBK dari hutan produksi terbatas di Desa Simasom.

Gambar 2 berikut ini menggambarkan proporsi jumlah pemanfaat HHBK dari hutan produksi terbatas di Desa Simasom.



Gambar 2. Proporsi masyarakat pemanfaat HHBK dari hutan produksi terbatas di Desa Simasom

### Nilai Ekonomi dan Kontribusi HHBK dari Hutan Produksi Terbatas terhadap Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat di Desa Simasom

#### a. Nilai ekonomi HHBK dari hutan produksi terbatas di Desa Simasom

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua HHBK yang dimanfaatkan masyarakat yang teridentifikasi telah tersedia informasi tentang harganya di pasaran sehingga penilaiannya juga sudah bisa dilakukan berdasarkan harga pasar tanpa melakukan pendekatan-pendekatan dimana hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bahrani (1999), jika nilai sumberdaya (ekosistem) hutan telah tersedia informasinya, maka pengelola hutan dapat memanfaatkannya untuk berbagai keperluan seperti pengambilan keputusan pengelolaan, perencanaan dan lain-lain.

Nilai ekonomi HHBK diperoleh dari perkalian total pengambilan per jenis per tahun dengan harga barang yang dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Persentasi Nilai Ekonomi HHBK yang Dimanfaatkan Masyarakat di Desa Simasom

No.	Jenis HHBK	Jlh (unit/ thn)	F	TP	Sat.	Harga (rb. Rp)	NE (jt. Rp)	%NE (%)
1	Rotan	951	36	34.236	Kg	1,5	51,35	7,10
2	Air nira	627	150	94.050	Liter	2	188,10	26,00
3	Ijuk	360	1	360	Kg	3	1,08	0,15
4	Gula merah	469	36	16.884	Kg	8	135,07	18,67
5	Kolang-kaling	1.325	1	1.325	Kg	4	5,30	0,73
6	Bambu	205	36	7.380	Kg	9	66,42	9,18
7	Kulit manis	285	36	10.260	Kg	6,8	69,77	9,64
8	Rusa	10	6	60	Ekor	500	30,00	4,15
9	Pakis hutan	21	36	756	Bltg	25	18,90	2,61
10	Babi hutan	13	12	156	Ekor	300	46,80	6,47
11	Durian	735	1	735	Biji	5	3,68	0,51
12	Kemiri	415	4	1.660	Kg	5	8,30	1,15
13	Petai	350	1	350	Kg	15	5,25	0,73
14	Duku	170	1	170	Kg	10	1,70	0,23
15	Humus	90	36	3.240	Goni	5	16,20	2,24
16	Kayu Bakar	9	12	108	Bak	700	75,60	10,45
Total							723,52	100

Keterangan: F = Frekuensi Pengambilan  
 TP = Total Pengambilan/tahun (Jumlah x F)  
 NE = Nilai Ekonomi (TP x Harga)

Nilai ekonomi HHBK diperoleh dari hasil perkalian total pengambilan per jenis per tahun (TP) dengan harga hasil hutan per jenis. Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai ekonomi pemanfaatan HHBK secara komersial oleh masyarakat di Desa Simasom, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan adalah sebesar Rp 723.519.000,- per tahun.

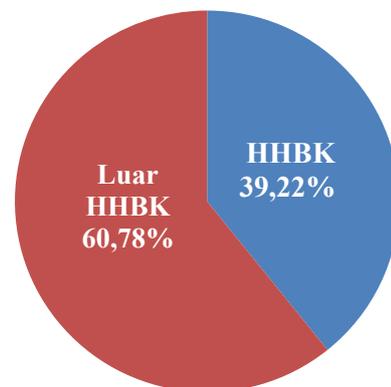
#### b. Kontribusi HHBK dari hutan produksi terbatas terhadap pendapatan rumah tangga masyarakat di Desa Simasom

Masyarakat Desa Simasom umumnya berprofesi sebagai petani, namun pendapatan masyarakat tidak hanya berasal dari usaha pertanian yang dijalani tetapi juga bisa berasal dari usaha-usaha lainnya seperti pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Masyarakat Desa Simasom memiliki beragam profesi seperti buruh tani, pedagang, peternak, pertanian, PNS, serta wirausaha. Tabel 5 berikut ini benunjukkan sumber dan jumlah total pendapatan masyarakat dari berbagai profesi di luar pemanfaatan HHBK dari hutan produksi terbatas di Desa Simasom.

Tabel 5. Pendapatan rumah tangga per tahun di luar pemanfaatan HHBK di Desa Simasom

No	Sumber pendapatan	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1	Buruh Tani	7.500.000	0,67
2	Pedagang	12.200.000	1,09
3	Peternak	22.100.000	1,97
4	Pertanian	858.380.000	76,56
5	PNS	36.000.000	3,21
6	Wirausaha	185.000.000	16,50
Total		1.121.180.000	100

Sementara pendapatan total seluruh masyarakat responden Desa Simasom baik dari pemanfaatan HHBK di hutan produksi terbatas maupun pendapatan dari luar pemanfaatan HHBK tersebut keseluruhan sebesar Rp 1.844.699.000,-/tahun. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jumlah pendapatan masyarakat dari pemanfaatan HHBK di hutan produksi terbatas berupa penjumlahan seluruh nilai ekonomi masing-masing jenis HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebesar Rp 723.519.000,-/tahun atau dengan persentase 39,22%. Sedangkan total pendapatan dari luar pemanfaatan HHBK tersebut seperti dari usaha pertanian (padi, terong, salak, karet, cokelat, cabe, tomat, sayur-sayuran, dll), buruh tani, pedagang, peternak, PNS, dan wirausaha adalah sebesar Rp 1.121.180.000,-/tahun atau dengan persentase kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga sebesar 60,78%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontribusi HHBK bagi pendapatan rumah tangga masyarakat di Desa Simasom masih lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi pendapatan dari luar HHBK karena memang pemanfaatan HHBK dari hutan produksi terbatas di desa tersebut hanya sebagai profesi sampingan mereka, penghasilan utama masih dari usaha pertanian. Perbandingan kontribusi pendapatan masyarakat di luar pemanfaatan HHBK dari hutan produksi terbatas dengan pendapatan dari pemanfaatan HHBK dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Persentase Nilai Ekonomi HHBK dari Hutan Produksi Terbatas dan Pendapatan di Luar Pemanfaatan HHBK di Desa Simasom

#### Distribusi Pendapatan dan Analisis Kemiskinan Masyarakat Pemanfaat HHBK dari Hutan Produksi Terbatas di Desa Simasom

##### a. Distribusi pendapatan masyarakat pemanfaat HHBK dari hutan produksi terbatas di Desa Simasom

Perhitungan distribusi pendapatan pada masyarakat pemanfaat HHBK di Desa Simasom dikelompokkan menjadi 5 kategori untuk mempermudah perhitungan berdasarkan jumlah total pendapatan per kapita masyarakat per tahun dari HHBK di hutan produksi terbatas Desa Simasom dengan total

responden 50 orang/KK atau dapat dilihat pada Tabel 6 (Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8). Kategori I merupakan kelompok masyarakat dengan pendapatan terendah pertama sebanyak 20% dari jumlah 50 responden, dan begitu seterusnya Kategori II 20% terendah kedua, Kategori III 20% terendah ketiga, Kategori IV 20% terendah keempat, dan Kategori V 20% terendah kelima. Pendapatan per kapita ini diperoleh dari total pendapatan HHBK tiap responden dibagi jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga tersebut.

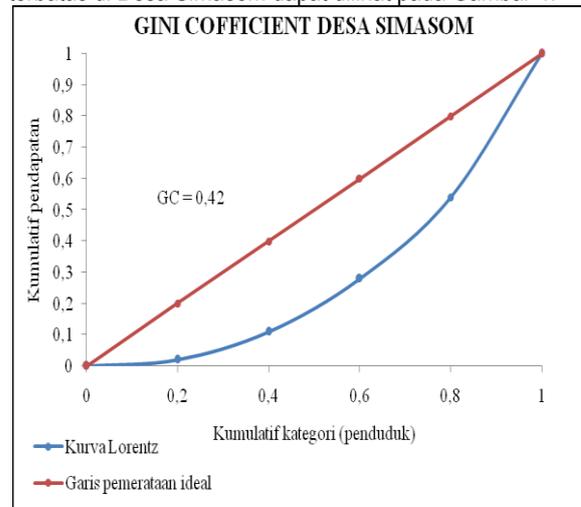
Tabel 6. Perhitungan *Gini Coefficient* tingkat ketimpangan pendapatan HHBK

Kat	Pendapatan per kapita	$X_i$	$Y_i$	$\sigma X_i$	$\sigma Y_i$	$\sigma X_i - \sigma X_{i-1}$	$\sigma Y_i + \sigma Y_{i-1}$	$(\sigma X_i - \sigma X_{i-1})(\sigma Y_{i-1} + \sigma Y_i)$
I	2.384.027,78	0,2	0,02	0,2	0,02	0,2	0,02	0,004
II	13.053.128,57	0,2	0,09	0,4	0,11	0,2	0,13	0,026
III	25.680.738,10	0,2	0,17	0,6	0,28	0,2	0,39	0,078
IV	39.116.287,30	0,2	0,26	0,8	0,54	0,2	0,82	0,165
V	68.537.595,24	0,2	0,46	1,0	1,00	0,2	1,55	0,309
Total		1,0	1,00					0,58
Gini Coefficient								0,42

Ket. :  $X_i$  = Proporsi Kategori (Kelas Masyarakat)  
 $Y_i$  = Proporsi Pendapatan  
 $\sigma X_i$  = Kumulatif Kategori  
 $\sigma Y_i$  = Kumulatif Pendapatan

Berdasarkan hasil perhitungan Gini untuk responden masyarakat pemanfaat HHBK di Desa Simasom, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan diperoleh angka Gini sebesar 0,42. Berdasarkan kriteria Oshima ketimpangan distribusi pendapatan di desa ini termasuk ketimpangan tinggi yang berarti terdapat perbedaan yang mendasar dalam distribusi pendapatan hasil pemanfaatan HHBK antara masyarakat yang memperoleh pendapatan yang tinggi dengan masyarakat yang memperoleh penghasilan rendah dari kegiatan ekonomi pemanfaatan HHBK tersebut. Ketimpangan ini bisa jadi disebabkan oleh kepemilikan atau penguasaan faktor produksi dengan kapasitas yang berbeda-beda tiap masyarakat pemanfaat HHBK. Faktor produksi yang dimaksud antara lain alat-alat produksi, tenaga kerja, serta modal. Faktor produksi yang biasa seperti lahan (luas lahan) tidak berpengaruh di sini karena sumber daya yang dimanfaatkan berupa hutan produksi terbatas dimana setiap masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengelola dan memanfaatkannya. Selain karena faktor-faktor produksi tersebut, besarnya pendapatan masyarakat dari usaha pemanfaatan HHBK dari hutan produksi terbatas ini ditentukan oleh giat tidaknya masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan HHBK tersebut. Selanjutnya gambaran pendapatan masyarakat secara visual digambarkan dalam kurva Lorenz. Koefisien Gini bernilai antara 0 sampai dengan 1 yang merupakan rasio antara luas area antara kurva *Lorenz* dengan garis pemerataan sempurna. Untuk lebih

jelasan kondisi pendapatan masyarakat dari kegiatan ekonomi pemanfaatan HHBK dari hutan produksi terbatas di Desa Simasom dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Kurva Lorenz Masyarakat Pemanfaat HHBK di Desa Simasom Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan

#### b. Analisis kemiskinan masyarakat pemanfaat HHBK dari hutan produksi terbatas di Desa Simasom

Hasil analisis terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan terdapat dua kategori kemiskinan, yaitu kategori kemiskinan rentan/*vulnerable/transient* (berada pada disekitar garis kemiskinan) dan miskin *absolute/persistent* (berada di bawah garis kemiskinan). Perhitungan garis kemiskinan pada penelitian ini hanya menggunakan satu standar garis kemiskinan, yaitu berdasarkan kriteria yang ditetapkan Bank Dunia. Sebenarnya standar yang umum digunakan di Indonesia ada dua selain standar Bank Dunia ada juga kriteria dari BPS. Namun berdasarkan hasil analisis kemiskinan yang pernah dilakukan oleh Firman, A dan Linda Herlina (2005) dalam penelitiannya terhadap peternak sapi perah, dengan menggunakan dua standar kemiskinan tersebut, jumlah orang miskin yang terjaring oleh standar kemiskinan Bank Dunia lebih banyak dibandingkan dengan BPS. Mengingat kondisi global yang sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia, maka standar Bank Dunia lebih akurat untuk menggambarkan kondisi kemiskinan di Indonesia. Standar garis kemiskinan yang dikeluarkan Bank Dunia adalah sekitar Rp 3.285.000/kapita/tahun (standar US\$ 1/kapita/hari) dengan kurs 1 US\$ = Rp 9.000.

Analisis kemiskinan di sini dilakukan pada dua kriteria perhitungan yaitu pertama masyarakat yang dihitung hanya dari pendapatan di luar HHBK, dan yang kedua adalah perhitungan pada total seluruh pendapatan termasuk pendapatan dari HHBK. Ini dimaksudkan selain untuk mengetahui sebesar apa kontribusi HHBK tersebut terhadap pendapatan rumah tangga masyarakat, juga untuk mengetahui sejauh mana pendapatan dari sektor HHBK ini dapat mengurangi jumlah masyarakat yang terjaring kemiskinan. Dalam hal

ini pendapatan HHBK dijadikan sebagai variabel kontrol apakah mampu memberikan pengaruh terhadap variabel terikat berupa pendapatan total yang berujung pada penentuan kategori masyarakat tersebut. Seperti disebutkan sebelumnya kemiskinan dibagi dua kategori, yaitu kemiskinan rentan/*vulnerable/transient* (berada pada disekitar garis kemiskinan) dan miskin *absolute/persistent* (berada di bawah garis kemiskinan). Yang dimaksudkan kemiskinan yang rentan atau yang berada di sekitar garis kemiskinan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat pemanfaat HHBK dari hutan produksi terbatas di Desa Simasom yang hidup di bawah garis kemiskinan jika yang dihitung hanya pendapatan dari luar HHBK saja yaitu miskin *absolute/persistent* sebanyak 40% 20 orang. Adapun masyarakat yang berada pada kondisi rentan (*vulnerable*) adalah sebanyak 16% atau 8 orang. Kemudian jika penentuan kriteria miskin ini dilakukan dengan patokan pendapatan total atau memperhitungkan pendapatan HHBK diperoleh hasil yaitu masyarakat miskin *absolute/persistent* hanya ada sebanyak 10% atau 5 orang. Adapun masyarakat yang berada pada kondisi rentan (*vulnerable*) adalah sebanyak 38% atau 19 orang. Sementara penduduk yang dinyatakan tidak miskin pada masing-masing kriteria tersebut berurutan sebesar 44% (22 Orang) dan 52% (26 orang) atau dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Jumlah penduduk yang berada pada kondisi kemiskinan

No.	Kriteria perhitungan	Garis kemiskinan (Rp/Kapita/Tahun)	Standar deviasi	Tidak miskin (Orang)	Jumlah orang termasuk	
					Miskin <i>persistent</i>	Miskin <i>vulnerable</i>
1	Pendapatan Luar HHBK	3.285.000	4.673.899,67	22	20	8
2	Pendapatan Total (HHBK + Luar HHBK)	3.285.000	6.092.980,02	26	5	19

Keterangan: Standar Deviasi digunakan untuk menghitung kondisi rentan (*vulnerable*)

Dari hasil analisis di atas menunjukkan bahwa kontribusi HHBK dari hutan produksi terbatas di Desa Simasom cukup untuk menyangga kehidupan masyarakat di Desa tersebut walaupun kegiatan ekonomi pemanfaatan HHBK ini bukanlah profesi utama mayoritas masyarakat di desa ini. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa kontribusi sektor pertanian bagi pendapatan rumah tangga masyarakat desa ini adalah yang paling besar, akan tetapi peran pendapatan dari sektor HHBK ini juga cukup signifikan, terbukti dari peranan pendapatan dari sektor HHBK ini sudah cukup memberikan kontribusi untuk menambah pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari dan tidak terjaring sebagai masyarakat miskin. Dari hasil analisis terlihat bahwa jumlah penduduk miskin persisten sebanyak 20 orang (40% dari seluruh responden) dan yang rentan mengalami kemiskinan sebanyak 8 orang (16% dari seluruh responden) jika yang dihitung hanya pendapatan dari luar HHBK. Namun setelah pendapatannya

ditambahkan dengan pendapatan dari HHBK, jumlah penduduk yang dinyatakan miskin persisten tersebut berkurang drastis menjadi hanya 5 orang (10% dari seluruh responden) saja. 15 orang lagi statusnya naik menjadi miskin *vulnerable* (rentan). Dengan demikian pendapatan dari sektor HHBK ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan persisten sebanyak 15 orang (75% dari jumlah penduduk miskin sebelumnya). Hal ini menunjukkan bila hasil produksi yang dihasilkan masyarakat pemanfaat HHBK berkurang maka akan berdampak pada pengurangan pendapatan bagi masyarakat. Di samping itu, bila pembayaran hasil penjualan produksi tidak sesuai dengan harga per kualitas (fluktuasi harga) dan waktu pembayarannya akan berdampak pada kerentanan terhadap kemiskinan. Sementara masyarakat yang dinyatakan tidak miskin berubah menjadi 26 orang dari sebelumnya 22 orang atau bertambah 4 orang karena pengaruh pendapatan dari sektor HHBK ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Jenis-jenis HHBK yang berasal dari hutan produksi terbatas yang dimanfaatkan masyarakat Desa Simasom adalah: rotan, air nira, ijuk, gula merah, kolang-kaling, bambu, kulit manis, rusa, pakis hutan, babi hutan, durian, kemiri, petai, duku, humus, dan kayu bakar.
2. Kontribusi nilai ekonomi dari seluruh jenis HHBK dari hutan produksi terbatas terhadap pendapatan rumah tangga masyarakat di Desa Simasom adalah Rp 723.519.000,-/tahun atau dengan persentase 39,22%.
3. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat dari pemanfaatan HHBK dari hutan produksi terbatas diukur berdasarkan nilai *Gini Coefficient* sebesar 0,42 yang berarti bahwa terjadi ketimpangan yang cukup besar antara masyarakat pemanfaat yang kaya dan yang miskin. Sementara pendapatan dari HHBK berkontribusi terhadap pengurangan jumlah masyarakat yang terjaring kemiskinan absolut (*persistent*) sebanyak 15 orang atau 75% dari jumlah masyarakat miskin.

### Saran

Masyarakat yang memanfaatkan HHBK dari hutan produksi terbatas hendaknya menunjukkan kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan tersebut selain untuk meningkatkan nilai tambah dari produk HHBK yang dihasilkan, juga tetap menjaga kelestarian hutan agar menggugah kepedulian pemerintah dalam memberi perhatian terhadap nasib masyarakat pemanfaat HHBK ini. Pemerintah hendaknya membuat suatu program *workshop* atau pelatihan kepada masyarakat terkait pengelolaan HHBK dari yang sekedar bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi. Selain itu, melihat betapa kontribusi HHBK ini cukup berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga masyarakat dan dalam mengurangi jumlah kemiskinan masyarakat desa sekitar hutan, hendaknya

pemerintah membuat suatu kebijakan terkait akses masyarakat adat sekitar hutan produksi tersebut untuk turut serta melindungi dan mengelola hutan tersebut baik melalui kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, serta kebijakan tentang penyediaan pasar untuk pemasaran hasil pemanfaatan HHBK. Dan yang terakhir adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kontribusi HHBK ini terhadap pendapatan rumah tangga dengan mempertimbangkan aspek potensi HHBK yang ada pada kawasan hutan dan langkah-langkah pelestarian yang perlu dilakukan. Hal ini penting dilakukan menyangkut keberlanjutan pemanfaatan HHBK ini di masa yang akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, O., P. Patana. 2004. Perhitungan Nilai Ekonomi Pemanfaatan Hasil Hutan Non-Marketable oleh Masyarakat Desa Sekitar Hutan. USU Digital Library. Medan.
- Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta. Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan. 1998. Buku Panduan Kehutanan Indonesia. Departemen Kehutanan dan Perkebunan Indonesia. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2002. Studi Analisis Kemiskinan Tahun 2001 (Draft). Bappenas. Jakarta.
- Bahrani. 1999. Penilaian Sumber Daya Hutan dan Lingkungan. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- BPS. 2013. Sistem Rujukan Statistik. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Diakses tanggal 5 Juli 2013.
- Departemen Kehutanan. 1990. UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. WWF Indonesia Program. Jakarta.
- Firman, A., dan L. Herlina. 2005. Analisis Kemiskinan dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan pada Peternak Sapi Perah. Fakultas Peternakan. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Latifah, S. 2004. Penilaian Ekonomi Hasil Hutan Non Kayu. USU Digital Library. Medan.
- Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Pandji, I. 2001. An Analysis Towards Urban Poverty Alleviation Program in Indonesia. Philosophy Doctor Dissertation. Faculty of the School Policy, Planning, and Development. University of Southern California. California.
- Prayitno, H., dan B. Santosa. Ekonomi Pembangunan. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rahayu, S., S. Kuswaryan., dan A. Rusmana. 2000. Analisa Pemerataan Pendapatan Usaha ternak Sapi Perah Rakyat (Survey Pada Peternakan Sapi Perah Rakyat di KUD Mitra Yasa Kabupaten Tasikmalaya). Fakultas Peternakan. Universitas Padjadjaran. Sumedang.